

Effectiveness of Management of Original Regional Revenue and its contribution to regional income of Muna Regency, Southeast Sulawesi

¹Ernawati Malik, ²Waode Adriani Hasan

^{1,2}, Universitas Muhammadiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya pada pendapatan daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif serta sumber data yaitu data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode untuk menganalisis tingkat Efisiensi dan efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Periode 2018 s.d 2022. Hasil penelitian menunjukkan Pemungutan Pendapatan asli daerah pada Kabupaten Muna selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan tingkat rasio efektivitas berfluktuasi akan tetapi senantiasa mengalami peningkatan, sedangkan rasio kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan rasio sangat kurang akan tetapi realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna selama 5 tahun terus mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi dan PAD

Corresponding author :

Email Address : ernamalik8975@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah seharusnya bisa memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di punggut dari masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi struktur anggaran dewan (Mahmudi, 2010).

(Laksmi & Supadmi, 2014) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa selain pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga akan menstransfer dana perimbangan

berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk membiayai belanja daerah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipunggut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Pendapatan daerah diklasifikasikan dalam dua sumber pokok yaitu pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat seperti pajak negara, bea cukai, ganjaran, subsidi dan sumbangan negara. Pendapatan Daerah sangatlah penting untuk dikelola dengan baik karena merupakan sumber daya keuangan untuk kegiatan otonomi daerah. Untuk beberapa urusan dalam pemerintahan yang awalnya merupakan sentralistis kini telah menjadi pemerintah yang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Yang kemudian hal ini didasari oleh semakin banyak kebutuhan dari persoalan masyarakat yang kemudian kebutuhan desentralisasi yang semakin diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Sumber dari pendapatan daerah berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dapat diberikan kepada daerah. (Moridu, 2021).

Adanya Otonomi Daerah juga memberikan wewenang pada setiap daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerahnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Pemerintahan Daerah sehingga semua daerah memiliki kesempatan guna meningkatkan pembangunan melalui inovasi, dan juga dapat menciptakan daya saing dalam tata kelola ekonomi daerah. Dalam merealisasikan sistem otonomi daerah, tingkat kemandirian dalam pengelolaan keuangan yang tinggi sangat diharapkan kepada pemerintah daerah. Jika tingkat atau tahap dari kemandirian pengelolaan keuangan yang tinggi dapat diartikan bahwa daerah bisa dikatakan tidak mesti bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat maupun provinsi melalui perimbangan. Tetapi, belum tentu jika tingkat atau tahap dari kemandirian keuangan daerah tinggi alhasil bisa dikatakan daerah tersebut tidak mesti memerlukan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Karena dana yang bersumber dari pendapatan APBN akan tetap dibutuhkan guna melakukan percepatan dalam membina daerah, dengan kata lain semakin tinggi tingkat atau tahap dari kemandirian daerah alhasil daerah akan mampu menyediakan reparasi publik yang bermutu. dengan adanya publikasi dari pemerintah daerah mengenai pembuatan Laporan Realisasi Anggaran jelas akan memberi informasi berguna untuk mengukur kinerja dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. (Supriyadi & Ahmad, 2021)

Pendapatan Daerah sangatlah penting untuk dikelola dengan baik karena merupakan sumber daya keuangan untuk kegiatan otonomi daerah. Untuk beberapa urusan dalam Untuk beberapa urusan dalam pemerintahan yang awalnya merupakan sentralistis kini telah menjadi pemerintah yang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Yang kemudian hal ini didasari oleh semakin banyak kebutuhan dari persoalan masyarakat yang kemudian kebutuhan

desentralisasi yang semakin diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Sumber dari pendapatan daerah berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dapat diberikan kepada daerah. (Irwan Moridu, 2021)

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman. Pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayahnya berpotensi untuk dipungut pajak. Adanya potensi-potensi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki. (Laksmi & Supadmi, 2014) Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibu Kota di Raha, yang memiliki luas wilayah 2.057,69 km² terdiri atas 22 Kecamatan, 26 Kelurahan dan 125 Desa dengan jumlah penduduk 224.690 jiwa (BPS Prov.Sulawesi Tenggara, 2023). Dengan jumlah penduduk yang padat tidak diikuti dengan luas wilayah akan berdampak pada pemerataan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Akan tetapi, jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan. Namun, melihat keadaan yang sekarang dimana tingkat pertumbuhan penduduk terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Pada umumnya penduduk lebih banyak menumpuk di daerah Kota dibanding Kabupaten (Yakub, Wijaya, & Effendi, 2022).

Sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Sulawesi Tenggara maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah Daerah. Berikut target dan realisasi PAD Kabupaten Muna 5 tahun terakhir, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muna tahun 2018 s.d than 2022

| No | Tahun | Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) |
|----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2018 | 100.380.010.000,- | 83.445.780.750,- |
| 2 | 2019 | 102.926.600.000,- | 43.431.161.758,- |
| 3 | 2020 | 78.333.000.000,- | 64.567.621.631,- |
| 4 | 2021 | 151.650.000.000,- | 77.707.027.214,- |
| 5 | 2022 | 135.030.000.000,- | 61.538.827.387,- |

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 1 diketahui, bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna selama 5 tahun mengalami fluktuasi, sementara target Pendapatan asli Daerah tidak terpenuhi hal tersebut dapat diketahui dari realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018 s.d 2022. Bahkan kesenjangan realisasi sangat menurun untuk tahun 2019. (Christianingrum & Aida, 2021) Peningkatan PAD sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja

daerah. Rendahnya penerimaan PAD dapat menjadi indikasi besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan.

KAJIAN TEORITIS

Laporan keuangan merupakan alat untuk menggambarkan kinerja program dan kegiatan suatu organisasi, Laporan keuangan adalah proses Akuntansi yang memberikan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan (Mardiasmo 2018). (Anggoro, 2017) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat. Lebih lanjut (Nasir, 2019) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pokok daerah terbesar yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai urusan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif Kuantitatif. Dimana metode ini digunakan untuk menganalisis tingkat Efisiensi dan efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Periode 2018 s.d 2022 dengan menggunakan rumus Rasio Efektifitas yaitu membagi jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan target Pendapatan Asli daerah (PAD) yang ditetapkan berlandaskan kemampuan rill daerah (Halim dan Kusufi, 2007),

Rasio Efektivitas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna, menggunakan data realisasi penerimaan dan target penerimaan, jika semakin besar presentase yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna , dengan formula :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2015)

Rasio Kontribusi mengidentifikasi besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut terhadap pendapatan Daerah (Laksmi & Supadmi, 2014). Berikut formula kontribusi PAD :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

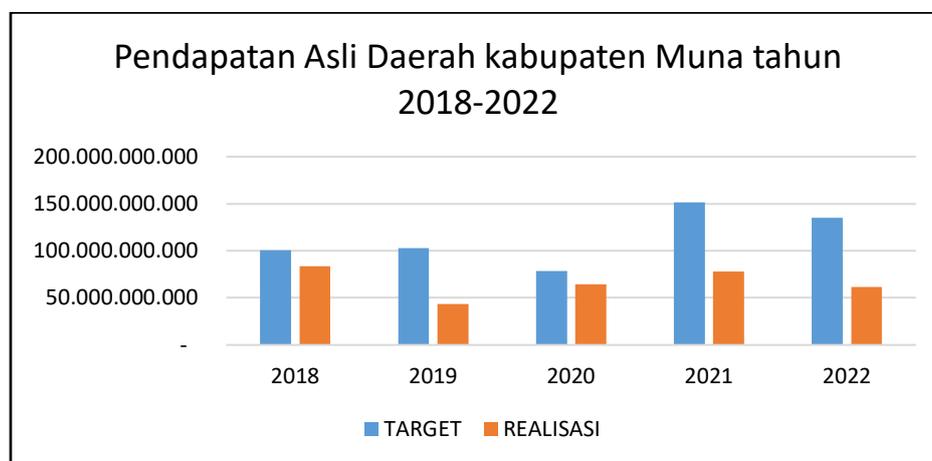
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna selama 5 tahun

| No | Tahun | Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) |
|----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2018 | 100.380.010.000,- | 83.445.780.750,- |

| | | | |
|---|------|-------------------|------------------|
| 2 | 2019 | 102.926.600.000,- | 43.431.161.758,- |
| 3 | 2020 | 78.333.000.000,- | 64.567.621.631,- |
| 4 | 2021 | 151.650.000.000,- | 77.707.027.214,- |
| 5 | 2022 | 135.030.000.000,- | 61.538.827.387,- |

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2024



Sumber : Data diolah 2024

Kriteria nilai efektivitas keuangan daerah menurut kemdagri No. 690.900.327 tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sangat Efektif : Nilai rasio diatas 100%
2. Efektif : Nilai rasio 90 – 100%
3. Cukup Efektif : Nilai rasio 80 – 90%
4. Kurang Efektif : Nilai rasio 60 – 80%
5. Tidak Efektif : Nilai rasio kurang 60%

Tabel 3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna tahun 2018-2022

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 2018 | 100.380.010.000,- | 83.445.780.750,- | 83% | Cukup Efektif |
| 2019 | 102.926.600.000,- | 43.431.161.758,- | 42% | Tidak Efektif |
| 2020 | 78.333.000.000,- | 64.567.621.631,- | 126% | Sangat Efektif |
| 2021 | 151.650.000.000,- | 77.707.027.214,- | 51,24% | Tidak Efektif |
| 2022 | 135.030.000.000,- | 61.538.827.387,- | 45,57% | Tidak Efektif |

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna selama 5 tahun untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Keadaan tidak efektif terjadi untuk tahun 2019, 2021 dan tahun 2022, sedangkan tahun 2018 cukup efektif, keadaan rasio efektivitas untuk tahun 2020 yaitu sangat efektif sebesar 126%. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Kabupaten Muna memiliki kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan mengoptimalkan potensi riil daerah Kabupaten Muna. Berdasarkan tabel diatas juga diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna terus mengalami

peningkatan walaupun terjadi penurunan yang cukup besar untuk tahun 2019 yang disebabkan oleh musibah covid-19 yang melanda Indonesia saat itu, akan tetapi tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Muna terus melakukan peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi yang disumbangkan dari Pendapatan asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah Halim, 2007). Berikut Kriteria kontribusi berdasarkan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Yuni 2005)

| Kontribusi (%) | Kriteria Kontribusi |
|----------------|---------------------|
| >50 | Sangat baik |
| 40,10 - 50,00 | Baik |
| 30,10 - 40,00 | Cukup baik |
| 20,10 - 30,00 | Sedang |
| 10,00 - 20,00 | Kurang baik |
| <10 | Sangat kurang |

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

Tabel 4 Hasil Analisis Tingkat Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Muna tahun 2018-2022

| Tahun | PAD | Pendapatan Daerah | Rasio kontribusi | Kriteria |
|-------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 2018 | 83.445.780.750,- | 1.123.507.029.224,- | 7,43% | Sangat kurang |
| 2019 | 43.431.161.758,- | 1.149.552.330.638,- | 3,77% | Sangat kurang |
| 2020 | 64.567.621.631,- | 1.240.355.114.367,- | 5,20% | Sangat kurang |
| 2021 | 77.707.027.214,- | 1.231.683.717.431,- | 6,30% | Sangat kurang |
| 2022 | 61.538.827.387,- | 1.187.078.013.851,- | 5,18% | Sangat kurang |

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas diketahui, rasio kontribusi pada Kabupaten Muna selama 5 tahun mengalami penurunan dan peningkatan, rasio kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan tahun 2019 saat terjadi musibah Covid-19 di Indonesia dan berdampak terhadap kontribusi PAD kabupaten Muna. Selain itu pemerintah Kabupaten Muna hendaknya menemukan keunggulan budaya serta potensi asli daerah utamanya dari sektor pariwisata dan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dan juga kesadaran wajib pajak atau retribusi. Selanjutnya terjadi peningkatan untuk tahun 2020, 2021 dan tahun 2022, walaupun secara keseluruhan kriteria kontribusi PAD selama 5 tahun pada kriteria sangat kurang. Sama dengan Pendapatan Asli Daerah yang berfluktuasi, Pendapatan Daerah Kabupaten Muna terus mengalami peningkatan, sekalipun rasio kontribusi pada tahun 2019 menurun akan tetapi Pendapatan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

SIMPULAN

Pemungutan Pendapatan asli daerah pada Kabupaten Muna selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan tingkat rasio efektivitas berfluktuasi akan tetapi senantiasa mengalami peningkatan, sedangkan rasio kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan rasio sangat kuarang akan tetapi realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna selama 5 tahun terus mengalami peningkatan.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara terus mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan asli daerah seperti, penerimaan dari pajak daerah, menambah objek dan subjek pajak serta mengembangkan sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dan juga perlu melakukan peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata sehingga akan membantu peningkatan Penerimaan Daerah tanpa sepenuhnya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan publik maka Pemerintah Kabupaten Muna perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Referensi :

Anggoro D, Damas, 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Malang. UB Press.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara 2023. <https://sultra.bps.go.id>

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah (Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy). *Jurnal Budget*, 6(1), 58-73. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX_IufpYmEAXVr1TgGHYy8AhcQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fjurnalbudget%2Fadenurulaida&usq=AOvVaw3y9zBT0jUuSIwT7BMj0q2i&opi=89978449

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik Edisi Ke 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Laksmi, S., & Supadmi, N. (2014). Efektivitas Pemungutan Pad Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 515-524. Retrieved from <https://repository.unud.ac.id/protected/storage/upload/repository/6449fc9089e486d22fcc2fe50f23c81d.pdf>

Mardiasmo.(2018) Perpajakan Edisi Terbaru Andi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit. Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08(2), 90-97. Retrieved from

file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 (2).pdf

Nasir, M S (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* , 29(1), 30-45.

Supriyadi, A. P., & Ahmad, F. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta periode 2015-2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 39-43. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9423>

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah Analysis. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15-28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>